

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PONDOK KUBANG BENGKULU TENGAH)**



SKRIPSI

Oleh

**JUNARMAN
NPM: C1C110018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
PONDOK KUBANG BENGKULU TENGAH)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Bengkulu Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi**

Oleh

**JUNARMAN
NPM: C1C110018**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2014**

Skripsi Oleh Junarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Bengkulu, 23 Juni 2014

Pembimbing,


Dr. Fadli, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19730203 199802 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Syamsal Bachri, SE., M.Si
NIP. 19560102 198603 1 002

Skripsi oleh Junarman ini

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada hari Senin, Tanggal 23 bulan Mei Tahun 2014

Bengkulu, 23 juni 2014

Dewan Penguji:

Pembimbing

Penguji Utama

Dr. Fadli, SE., MsSi., Ak., CA

Isma Coryanata, SE., M.Si., Ak

NIP. 19730203 199802 1 001

NIP. 19740306 199903 2 001

Anggota I

Anggota II

Nila Aprila, SE., M.Si., Ak

Siti Aisyah, SE., M.Si., Ak

NIP. 19750415 200112 2 001

NIP. 19780510 200501 2 003

**Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Bengkulu
Wakil Dekan Bidang Akademik**

Dr. Fahrudin J.S. Pareke., SE., M.Si

NIP. 19710914 199903 1 004

MOJIB

- ❖ *Orang besar bukanlah orang yang otaknya besar, tapi ia mengambil hal yang sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna (Mario Teguh)*
- ❖ *Berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya kelak kamu akan memperoleh hasil yang baik (Al-An'am: 135)*
- ❖ *Hidup itu adalah pilihan, pilihlah diantara itu dan tekunilah (Bapak Fadli dan Ibu Siti Atiyah)*
- ❖ *Hidep berakal, mati beriman.*
- ❖ *Kebahagiaan yang paling sejati bagiku adalah ketika melihat orang tuaku bahagia karena aku*

PERSEMBAHAN :

Sujud syukur pada-Mu ya Allah. Atas nikmat sehat dan kekuatan yang engkau berikan untukku, sehingga aku dapat menggapai impian yang telah kudambakan. Kupersembahkan karya ini untuk

- ♥ *Orang Tuaku (Bapak Maryan dan Ibu Atsmawati) yang telah memberikan Do'a, dorongan semangat dan motivasi kepadaku*
- ♥ *Adik-adikku tersayang (Jrisanjaya, Depi Akbar, Pardi Sohri)*
- ♥ *Pakwo aku yang paling aku banggakan (Dr.Ht.Daimun Hambali M.Pd) orang yg menjadi panutan dan orang yang selalu memberi motivasi dalam hal apapun dalam hidup aku selama ini.*
- ♥ *Sahabat-sahabatku (Agung Pamuji, Karan Sahidin, Sri Yuniarti, Nur Hayati, Taufik, dan teman lain yang tidak dapat disebut semua)*
- ♥ *Orang yang special dihidupku mimi (Ira Oktilestari) yang selalu setia menemani, membantu dan mendukung dalam susah ataupun duka selama ini.*
- ♥ *Almamatertku*

Ucapan Terimakasih

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Sebuah kelegaan sesaat, karena segala sesuatunya tidak berakhir disini, melainkan baru saja dimulai. Penulis ingin sekali berterimakasih kepada mereka yang telah membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis yaitu:

- 1. Bapak Mak, orang tua terhebat di dunia yang telah memberikan kasih sayang begitu tulus dalam do'a dan dukungannya selama ini untuk mengantarkan penulis jadi sarjana.*
- 2. Bapak Dr. Fadli, S.F., M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu menyempatkan waktu dan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*
- 3. Ibu Isma Corynata, S.F., M.Si., Ak., Ibu Nila Aprilia S.F., M.Si., Ak., Ibu Iri Atiyah, S.F., M.Si., Ak. selaku tim penguji yang telah mengoreksi, memberikan saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik.*
- 4. Keluarga besar Gedung K dan Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis.*
- 5. Seluruh dosen ekonomi akuntansi yang telah memberikan pengajaran dan bekal pendidikan kepada penulis yang tak terlupakan.*
- 6. Untuk mimi (Ira Oktilestari) yang telah memberi suport dan siap menjadi lampiasan dan tumpahan emosi disaat penat dan letih, makasih ya mimi.*
- 7. Teman-teman satu angkatan 2010 kelas A dan B, serta adik-adik angkatan 2011 dan 2012, kalian semua yang terbaik.*
- 8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.*



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONDOK KUBANG BENGKULU TENGAH)** Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 26 mei 2014, adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat secara keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menggunakan gagasan dan pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri. Atau terdapat sebagian ataupun keseluruhan tulisan saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak disengaja, saya akan menarik SKRIPSI yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan universitas batal saya terima.

Bengkulu, Juni 2014
Yang Membuat Pernyataan



Junarman
C1C110018

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MOTIVATION TO PAY LAND AND BUILDING TAX (CASED STUDY IN KECAMATAN PONDOK KUBANG BENGKULU)

By:
Junarman¹⁾
Fadli²⁾

ABSTRACT

This research is motivated by a wide number of areas in Kecamatan Pondok Kubang that still non be the Object of land and building tax. This indicates the owner of the land is still reluctant to register. Plus the realization of Land and building tax is only 50% from the total per year (DHKP PBB, 2013), This means that the object has been registered as tax object still reluctant to pay.

This study is a descriptive study to obtain a description of the factors that would motivate people to participated to pay land and building tax. The study was conducted in Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. The analysis was conducted by distributing questionnaires to be tested and the results are compared with the hypotheses that have been made. Variables that used are the motivation to pay PBB, level of education, knowledge of the PBB and the existing taxation system.

The results of this study indicate that the ability of independent variables to explain the dependent variable only 27% (r² test), in addition to the influence exerted by the independent variables to the dependent simultaneously affect (F test results), and partially independent variable does not affect dipenden variables (t test).

Key Word: Land and Building tax, Motivatin to pay PBB, Level of education, Knowledge of the PBB, Exixting taxation system.

¹⁾ Bachelor Candidate of Economic (Accounting) University of Bengkulu

²⁾ Dosen Supervisor

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PONDOK KUBANG
BENGKULU TENGAH)**

Oleh:
Junarman¹⁾
Fadli²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya luas wilayah pondok kubang yang belum menjadi objek PBB. Ini menandakan para pemilik tanah masih enggan mendaftarkannya. Ditambah lagi realisasi PBB hanya 50% dari total tagihan PBB yang dikeluarkan setiap tahunnya (DHKP PBB, 2013), ini berarti yang telah terdaftar sebagai objek pajakpun masih enggan untuk membayar PBB.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yang akan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Analisis dilakukan dengan menguji data hasil penyebaran kuisioner dengan hipotesis yang telah dibuat. Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji R^2 , uji F dan uji t. Variabel yang di uji adalah variabel dependen yaitu Motivasi membayar PBB (Y), variabel independen 1 yaitu Tingkat pendidikan (x1), variabel independen 2 yaitu Pengetahuan tentang PBB (x2) dan variabel independen 3 yaitu Sistem perpajakan yang berlaku (x3).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel x1, x2, dan x3 berpengaruh secara simultan terhadap Y (hasil uji F), kemampuan x1, x2, dan x3 menjelaskan Y hanya 9% (hasil uji R^2) dan secara parsial x1, x2, dan x3 tidak mempengaruhi Y (uji t).

Kata Kunci: PBB, Motivasi membayar PBB, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan tentang PBB, Sistem Perpajakan yang berlaku.

¹⁾ Calon Sarjana Ekonomi (Akuntansi) Universitas Bengkulu

²⁾ Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan kebaikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah)”.

Tujuan dan maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu. Penulis menyadari selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan motivasi baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, adik saudara dan keluarga besar, terima kasih banyak atas semua do'a, dukungan, semangat dan bantuan yang diberikan sampai dengan studi ini selesai.
2. Bapak Dr.Fadli, SE., M.Si.,Ak., selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu menyempatkan waktu dan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Isma Corynata, SE., M.Si., Ak.,Ibu Nila Aprila SE., M.Si., Ak., Ibu Iti Aisyah, SE., M.Si., Ak. Selaku tim penguji yang telah mengoreksi, memberikan saran, dan masukan untuk perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih baik.
4. Bapak Syamsul Bachri, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Ekstensi Ekonomi Universitas Bengkulu.

5. Ibu Isma Coryanata, SE., M.Si., Ak selaku Sekretaris Program Ekstensi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberika arahan dan bimbingan, serta membantu kelancaran urusan akademik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Prof. Lizar Alfanzi, SE., MBA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
7. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc selaku Rektor Universitas Bengkulu.
8. Seluruh dosen Akuntansi Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berbagai fasilitas serta bantuan dalam penulisan skripsi ini dan selama masa kuliah.
9. Sahabat dan semua teman-teman seperjuanganku.
10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan yang dapat menyempurnakan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bengkulu, 23 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PEMBUATAN SKRIPSI	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori-Teori Motivasi	7
2.1.2 Pengertian Motivasi	9
2.1.3 Bentuk-Bentuk Motivasi	11
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi	12
2.1.5 Pengertian dan Unsur Pajak	15
2.1.5.1 Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.1.5.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.1.5.1.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.5.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.5.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	19
2.1.5.3 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	19
2.1.5.4 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.1.5.5 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	20
2.1.5.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.2.1 Kerangka Pemikiran	22
2.2.2 Pengembangan Hipotesis	23

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Variabel penelitian dan definisi operasional	26
3.2.1 Variabel penelitian	26
3.2.2 Definisi operasional Variabel	27
3.3 Populasi dan Sampel	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Analisa Data	32
3.5.1 Statistik Deskriptif	33
3.5.2 Uji Kualitas Data	33
3.5.3 Uji Asumsi Data	34
3.5.4 Analisis Regresi.....	36
3.5.5 Uji Hipotesis	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran umum Objek penelitian	39
4.1.2 Populasi dan Sampel Penelitian	39
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	41
4.2.1 Motivasi Wajib Pajak Membayar Pajak	41
4.2.2 Tingkat Pendidikan Wajib Pajak	42
4.2.3 Tingkat pengetahuan Wajib Pajak	42
4.2.5 Uji Validitas	43
4.2.6 Uji Reliabilitas	44
4.2.7 Uji Normalitas	45
4.2.8 Uji Multikolineritas	45
4.2.9 Uji Heterokedisitas	46
4.3 Uji Hipotesis.....	47
4.3.1 Uji F	47
4.3.2 Uji R^2	47
4.3.3 Uji t	48
4.4 Pembahasan	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Implikasi Penelitian	55
5.3 Keterbatasan Penelitian	55
5.4 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Motivasi Wajib Pajak PBB	41
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak PBB	42
Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak PBB	42
Tabel 4. Sistem Perpajakan	43
Tabel 5. Uji Validitas	44
Tabel 6. Uji Reliability	44
Tabel 7. Uji Normalitas Motivasi	45
Tabel 8. Uji Multikolinieritas	46
Tabel 9. Uji Heterodestisitas	46
Tabel 10. Uji F.....	47
Tabel 11. Uji R ²	47
Tabel 12. Uji t.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Usaha untuk mencapai keberhasilan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari masyarakat yang berdasarkan undang-undang 1945, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara. Hal ini merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata mata digunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Penerimaan PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah.

Menurut Pratiwi (2012) studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya transparan pemerintah dalam pengelolaan kas Negara dan

selain itu banyaknya kejadian-kejadian kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pajak negara, serta rakyat kurang diikut sertakan dalam pembangunan tersebut. Berdasarkan studi empiris di atas, dimana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembayaran PBB bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai IMB untuk bangunan dan sertifikat tanah untuk kepemilikan lahan. Jumlah pembayaran atau pungutan PBB ini berdasarkan luas tanah yang tertera di surat sertifikat tersebut yang harus dibayar satu kali dalam setiap satu tahun.

Kemudian beberapa penelitian sebelumnya juga ada melakukan penelitian tentang pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dengan motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran PBB. Seperti halnya yang dinyatakan dalam penelitian Pratiwi (2012) menyatakan bahwa dari ketiga variabel yaitu sikap, motivasi, dan kesadaran. Hanya variabel motivasi saja yang tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, Yudiasari (2011) menyatakan bahwa variabel sikap dan motivasi secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, Siahhan (2010) menyatakan bahwa variabel tingkat motivasi masyarakat dengan partisipasi pembayaran pajak bumi bangunan dinyatakan kurang tinggi.

Tetapi penelitian yang lain menyatakan sebaliknya, menurut Nugraha (2002) dalam penelitiannya, motivasi masyarakat yang kurang menyebabkan masyarakat enggan atau berat hati melakukan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan. Ini dikarenakan wajib pajak di daerah pati lebih menganggap Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah kewajiban yang dipaksakan kepada mereka. Ghoni (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan hal yang sama. Motivasi wajib pajak kurang karena menganggap membayar pajak merupakan paksaan. Dan Yuliantun (2013) menyatakan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa dari hasil regresi berganda dan pengujian hipotesis baik melalui Uji t dan Uji F diketahui bahwa pendidikan, motivasi, dan sikap petugas pajak bumi dan bangunan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian sebelumnya memperlihatkan bagaimana motivasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Tetapi mereka belum membahas apa saja faktor yang sebenarnya mempengaruhi motivasi para wajib pajak tersebut. Motivasi membayar pajak itu sendiri menurut Mangkoesobroto (1999) dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Pengetahuan wajib pajak, Tingkat Pendidikan wajib pajak, dan sistem pajak yang berlaku. Sehingga perlu diteliti bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap motivasi wajib pajak.

Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan sebuah kecamatan dengan tingkat realisasi PBB yang cukup rendah yaitu $\pm 50\%$ dari total tagihan PBB tahunan. Selain itu jumlah luas tanah yang menjadi objek PBB pun masih jauh dari yang seharusnya. Dari total luas 92km^2 (BPS, 2013) baru 38km^2 yang menjadi objek PBB (DHKP PBB, 2013) jika dikurangi dengan Hutan raya Rajalelo yang luasnya 11km^2 (BPS, 2013),

maka didapat bahwa masih ada 43km² yang belum didaftarkan sebagai objek PBB.

Karena PBB merupakan jenis pajak dimana objek pajak didaftarkan oleh pemegang hak milik, maka masih banyaknya luas wilayah pondok kubang yang belum menjadi objek PBB menandakan para pemilik tanah masih enggan mendaftarkannya. Ditambah lagi realisasi PBB hanya 50% dari total tagihan PBB yang dikeluarkan setiap tahunnya (DHKP PBB, 2013), ini berarti yang telah terdaftar sebagai objek pajakpun masih enggan untuk membayar PBB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta peneliti secara pribadi sering mendengar isu dari warga kecamatan pondok kubang bahwa masyarakat yang ada di kecamatan pondok kubang masih banyak yang merasa tidaklah penting membayar PBB. maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONDOK KUBANG BENGKULU TENGAH)”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut

1. Apakah pengetahuan masyarakat mengenai PBB berpengaruh terhadap motivasi masyarakat Kecamatan Pondok kubang untuk membayar PBB?

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap motivasi masyarakat untuk membayar PBB?
3. Apakah sistem perpajakan yang berlaku berpengaruh terhadap motivasi masyarakat untuk membayar PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diuraikan atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai PBB terhadap motivasi masyarakat untuk membayar PBB?
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi masyarakat untuk membayar PBB?
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem perpajakan yang berlaku terhadap motivasi masyarakat untuk membayar PBB?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk:

1. Bagi penulis

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar setara satu di perguruan tinggi dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama studi

2. Bagi Universitas

Memberikan sumbangan informasi dan menambah referensi serta pemahaman bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi instansi yang terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kecamatan Pondok Kubang dalam faktor-faktor untuk meningkatkan motivasi masyarakatnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan dapat terfokus pada objek yang diteliti maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan terhadap materi penelitian maupun lokasi penelitian. Ruang lingkup materi Pada penelitian ini dibatasi pada kajian Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan Ruang Lingkup permasalahan dan pembahasan dibatasi pula pada lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori-Teori Motivasi

Teori Motivasi Menurut Setiadi (2003) motivasi berasal dari bahasa latin yang berbunyi “*movere*” yang berarti dorongan atau menggerakkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia. Motivasi semakin penting agar setiap individu mendapatkan tujuan yang diinginkannya secara optimum. Menurut Lubis (2011), menyatakan teori motivasi dibagi menjadi dua yaitu:

1. Teori Motivasi Awal
 - a. Teori Hirarki Kebutuhan

Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempegaruhi perilaku. Maslow mebagi kebutuhan ini kedalam beberapa kelompok yang pengaruhnya berbeda-beda yaitu terdapat pada lima tingkatan yang berbentuk piramid. Secara singkat, kelima hierarki kebutuhan manusia oleh maslow dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan fisik, seperti kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar dan haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian dan sebagainya.
2. Kebutuhan akan keamanan yaitu kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan, atau pemecatan.

3. Kebutuhan Sosial yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok rasa kekeluargaan, persahabatan dan kekeluargaan.
4. Kebutuhan akan penghargaan yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk menggunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang paling sesuai dengan dirinya.

b. Teori X dan Teori Y

Gregor (dalam Irfan, 2011) mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia bahwa manusia memiliki dasar negatif yang ditandai Teori X dan yang satu lagi positif yang ditandai sebagai Teori Y. Teori X menggambarkan bahwa masyarakat tidak ada motivasinya dalam berpartisipasi membayar pajak bumi bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan Teori Y menggambarkan masyarakat sangat termotivasi dan sangat antusias untuk membayar pajak bumi dan bangunan agar dapat mendukung pembangunan daerah dengan cepat dan berkelanjutan.

2. Teori Kontemporer Motivasi

- a. Teori ERG (Existence, Relatedness, Growth)
- b. Teori ini dikemukakan oleh Claiton Alderfer (dalam Lusiana, 2009) yang menyatakan ada tiga kelompok kebutuhan inti yaitu eksistensi, keterhubungan dan pertumbuhan.

c. Teori Keadilan

Intisari dari teori keadilan ini adalah bahwa para individu membandingkan input dan output menjadi suatu nilai yang tidak sebanding. Irfan (2011). Dari intisari tersebut teori motivasi ini dapat diasumsikan bahwa masyarakat dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan adil dalam pembangunan daerah dan masyarakat membayar pajak untuk mendapatkan imbalan dari pemerintah seperti pembangunan daerah. Keadilan dapat mempengaruhi motivasi terhadap masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan ketidakadilan juga dapat membuat tidak adanya motivasi masyarakat untuk membayar pajak bumi bangunan.

2.1.2 Pengertian Motivasi

Pada hakekatnya motivasi membayar pajak adalah suatu dorongan dalam diri setiap individu dimana (dalam hal ini) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin dan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ataupun karena sanksi yang berlaku. Banyak para ahli memberikan pengertian terhadap motivasi yang berkaitan dengan individu seseorang. Secara umum motivasi merupakan kondisi atau sekumpulan faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang (internal) dan juga dapat berasal dari luar (eksternal) atau lingkungan yang ada. Menurut Lubis (2011), motivasi adalah proses yang dimulai dengan definisi psikologis menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditinjau untuk tujuan insentif. Berhubungan dengan pendapat di atas

maka pada penelitian ini motivasi adalah dorongan dan keinginan seseorang hingga dia ingin berpartisipasi dan ikut peran dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tanpa karna merasa terpaksa demi meningkatkan pendapatan daerah sebanyak-banyaknya agar dapat mendorong pemerintah dalam pembangunan daerah.

Hasibuan (2003) mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang, agar mereka mau bekerja sama, seperti efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Robbins (2003) motivasi adalah kesedian untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dan tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Berdasarkan Pernyataan tersebut maka motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat, agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses meningkatkan pendapatan daerah demi mempercepat pembangunan daerah.

Menurut Anwar (2004) mengatakan motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan dan mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sedangkan Stanford (dalam hendrani, 2008) ada tiga hal penting dalam pengertian motivasi yaitu hubungan antara kebutuhan, dorongan dan tujuan.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah merupakan sejumlah proses-proses psikologi, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke tujuan tertentu, baik yang bersifat internal, atau

eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang memiliki motivasi dalam membayar Pajak Bumi Bangunan dapat diketahui dari pemahamannya mengenai pajak, khususnya Pajak Bumi Bangunan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi seseorang (wajib pajak) untuk membayar PBB secara lengkap, rutin dan tepat waktu. Selain itu wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan jika merasa tidak mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan wajib pajak tersebut dapat pula mengajukan banding apabila merasa tidak puas atas keputusan yang diberikan oleh petugas pajak baik mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterimanya tidak sesuai dengan objek pajak yang dikenakan ataupun masalah lainnya, karena peraturan-peraturan yang ada di dalam Pajak Bumi dan Bangunan atau perpajakan yang lain disusun berdasarkan suatu landasan hukum. Jadi, motivasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah bagian dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hukum yang berlaku.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Motivasi

Winkle (2004) menyatakan lebih lanjut bahwa terdapat dua motivasi yang dapat membentuk perilaku:

- a. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

b. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik bukan suatu bentuk motivasi yang berasal dari luar, misalnya orang lain. Motivasi ekstrinsik selalu berpangkal pada suatu kebutuhan yang dihayati oleh individu sendiri, walaupun individu lain mungkin memegang peranan dalam menimbulkan motivasi tersebut.

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi

Menurut Mangkoesobroto (1999) Motivasi membayar pajak sering dikaitkan dengan suatu dorongan dari dalam diri setiap wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat, dimana semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak maka semakin mudah bagi pemerintah untuk memotivasi atau pun menyadarkan Wajib Pajak dalam kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pengetahuan yang dimaksud berupa pengetahuan mengenai pentingnya pajak bagi Negara dan masyarakat, jenis-jenis pajak yang berlaku, cara penghitungan tarif pajak, cara mengisi formulir pajak, cara membayar pajak dan pengetahuan mengenai pajak yang lain.

2. Tingkat Pendidikan, tahapan pendidikan yang dimiliki Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang termasuk Non Pendidikan Tinggi (SD, SLTP, SMA) dan Pendidikan Tinggi (Diploma/Sarjana) yang merupakan suatu proses berkelanjutan yang diperoleh secara bertahap dan terpadu melalui jalur formal tertinggi sampai akhir dengan mendapatkan tanda lulus (ijazah). Hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan biasanya motivasi untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi. Ini dikarenakan orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi pula, sehingga kesadarannya akan pajak juga lebih tinggi.
3. Sistem yang berlaku, terutama pada sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana. Pada sistem pajak yang memiliki administrasi yang memudahkan masyarakat, kesadaran dan motivasi masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak menjadi lebih besar.

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Motivasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pajak merupakan penghasilan negara yang saat ini mulai diandalkan sebagai modal pembangunan. Pemerintah mencoba untuk mengugah motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan budi pekerti, kesuksesan maupun pemahaman seseorang dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, karena dengan pendidikan

dapat membawa seseorang yang belum dewasa ke tingkat kedewasaan dalam arti termotivasi dan mampu memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral.

Menurut Nurwati (1995), bahwa wajib pajak yang memiliki latar belakang atau tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka proporsi motivasi untuk membayarnya juga akan semakin tinggi. Sedangkan Menurut handayani (2007) hubungan antara tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kesadaran membayar pajak.

Dari pernyataan diatas, latar belakang pendidikan membawa seseorang kepada tingkat pemahaman akan tanggung jawabnya serta motivasi atau kesadaran untuk mematuhi berbagai hukum yang berlaku. Dalam hal ini tingkat pendidikan serta motivasi berpengaruh sangat penting bagi masyarakat dalam melunasi pembayaran pajak. Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan seseorang menjadi pribadi yang bijaksana dan wajib pajak yang taat akan melunasi pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang diantaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan masing-masing wajib pajak, dimana pembayaran pajak ini bersifat mengikat dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang masalah deskripsi teoritis, dapat diduga jika tingkat pendidikan semakin tinggi maka motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat. Sebaliknya jika pendidikan rendah maka

motivasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menurun juga.

2.1.5 Pengertian dan unsur pajak

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (natural resources). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu tidak membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Menurut Andriani (2006) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan definisi diatas pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang tanpa jasa.

Secara langsung yang penerimaannya digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping itu pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.
- 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan definisi dan unsur pajak yang telah diuraikan diatas, bahwa pajak ialah suatu pungutan wajib bagi setiap warga negara yang gunanya untuk pembangunan. Jadi pajak sangat berperan aktif sebagai sumber dalam pembangunan sarana dan prasarana publik yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

2.1.5.1 Pajak Bumi dan Bangunan

2.1.5.1.1 Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Menurut Suandy (2008) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu, bumi/ tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Dari definisi diatas, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi (yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

laut wilayah Republik Indonesia) dan Bangunan (meliputi jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, dll).

2.1.5.1.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang No. 12 pasal 4 ayat (1) Tahun 1994 tentang PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sehingga wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan bumi dan atau bangunan tersebut.

2.1.5.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang No. 12 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Tahun 1994 tentang PBB adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah dapat diperhatikan melalui faktor-faktor sebagai berikut : a. Letak. b. Peruntukan. c. Pemanfaatan. d. Kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan dapat diperhatikan melalui faktor-faktor sebagai berikut: a. Bahan

yang digunakan. b. Rekayasa. c. Letak. d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Adapun Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 Pasal 3 ayat (1) Tahun 1994 tentang PBB adalah

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan seperti : tempat ibadah, sarana sosial, sarana kesehatan, tempat pendidikan, sarana kebudayaan nasional.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik dan digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Jadi tidak semua bangunan dapat dikenakan sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu pemerintah memberikan batasan-batasan jenis bangunan yang dapat dijadikan sebagai objek PBB yang semuanya tercantum dalam Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.5.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berbunyi :

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas *self assessment*.
3. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20 % (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.
4. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

2.1.5.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan maksimum Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Jika

wajib pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka NJOPTKP hanya dikenakan pada salah satu objek dipilih yang mempunyai nilai jual paling tinggi.

2.1.5.5 Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak menurut UU No. 12 Tahun 1994 Tentang PBB adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Adapun cara menghitung PBB :

Tarif Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP (Nilai Jual Kena Pajak)} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

2.1.5.6 Surat Ketetapan Pajak (SKP)

SKP dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal :

- a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Pajak

2.1.5.7 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam tata cara pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang tata cara

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun tata cara pembayaran PBB adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.
- 2) Wajib pajak yang telah menerima SKP harus melunasi pajaknya selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya SKP.

Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak/ kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Nugraha (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sikap, Motivasi dan Status Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pati Jawa Tengah, motivasi masyarakat yang kurang menyebabkan masyarakat enggan atau berat hati melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ini dikarenakan wajib pajak di daerah pati lebih menganggap Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebuah kewajiban yang dipaksakan kepada mereka.

Ghoni (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Daerah” juga menyimpulkan hal yang sama. Motivasi wajib pajak kurang karena menganggap membayar pajak merupakan paksaan.

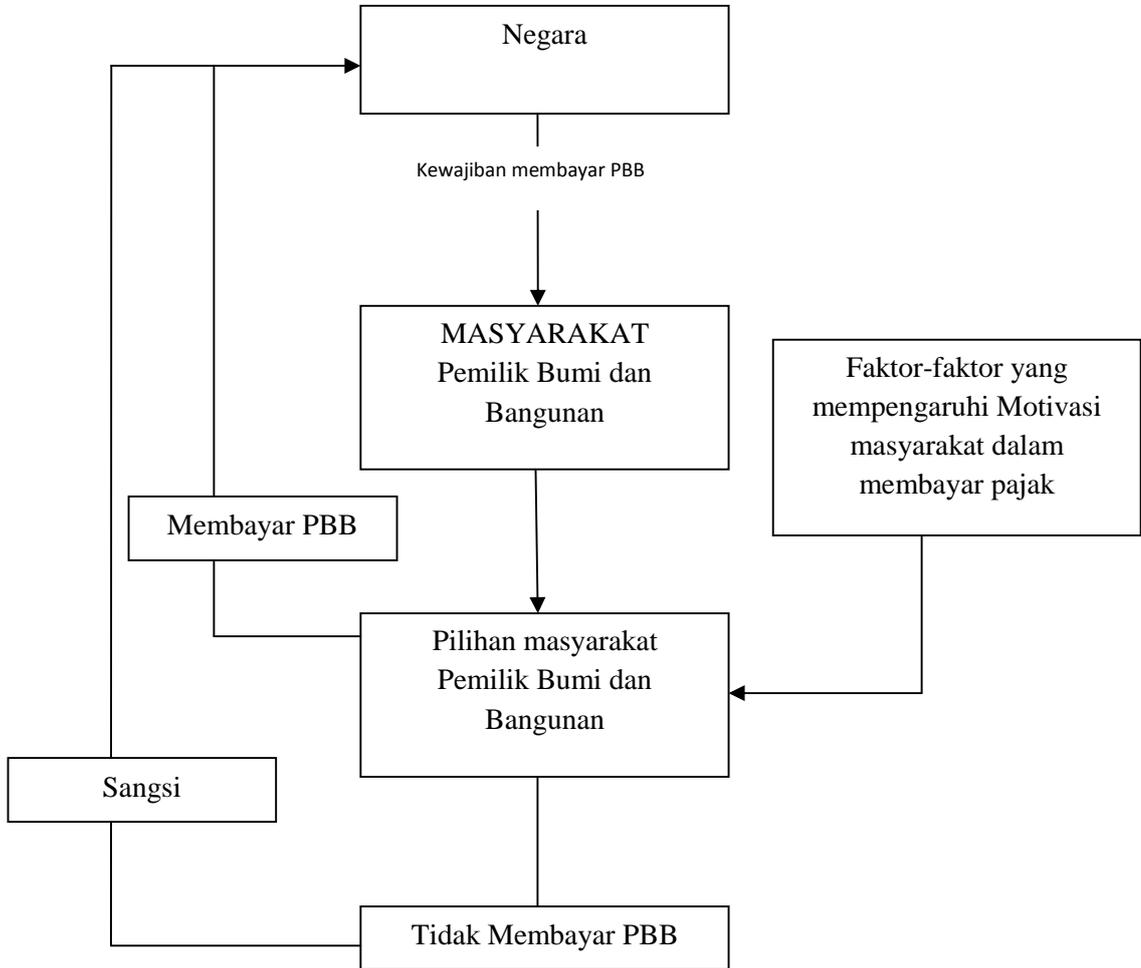
Yuliantun (2013) menyatakan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa dari hasil regresi berganda dan pengujian hipotesis baik melalui Uji t dan Uji F diketahui bahwa pendidikan, motivasi, dan sikap petugas pajak bumi dan bangunan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan.

Mangkoesebroto (1999) dalam bukunya menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk membayar pajak dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu Pengetahuan wajib pajak, Tingkat Pendidikan wajib pajak, dan sistem pajak yang berlaku. Ini diperkuat oleh Robbins (2008) yang menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 2 jenis factor yaitu: Faktor internal berupa Tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, harapan masa depan, dan pembawaan individu. Serta faktor eksternal berupa lingkungan, pemimpin dan kepemimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi, dorongan atau bimbingan atasan.

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Meskipun membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pemilik tanah dan bangunan di Indonesia, tetapi pada kenyataannya wajib pajak memiliki 2 pilihan, yaitu membayar ataupun tidak membayar. Motivasi mereka untuk membayar atau tidak membayar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sistem perpajakan itu sendiri. Sehingga penulis ingin meneliti seberapa

besar pengaruh factor-faktor tersebut terhadap motivasi wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan masyarakat Pondok Kubang terhadap Motivasi membayar Pajak bumi dan bangunan

Menurut Mangkoesoebroto (1999) pengetahuan masyarakat berpengaruh terhadap motivasi masyarakat membayar Pajak, karena semakin tinggi pengetahuan

masyarakat mengenai pajak, maka akan semakin mudah pemerintah memotivasi taupun menyadarkan wajib pajak dalam kewajibannya dibidang perpajakan. Ini didukung oleh Ghoni 2012 yang memasukkan variabel ini didalam penelitiannya, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis pertama:

H1: Pengetahuan Masyarakat mengenai PBB berpengaruh Terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan

2.2.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi masyarakat pondok kubang membayar Pajak bumi dan bangunan

Menurut Mangkoesobroto (1999) Tingkat Pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap motivasi masyarakat membayar Pajak Bumi dan bangunan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wajib pajak, maka akan mempermudah mereka memahami cara-cara penagihan dan pembayaran pajak. Sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis kedua:

H2: Tingkat pendidikan Masyarakat berpengaruh Terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan

2.2.3 Pengaruh Sistem Perpajakan yang berlaku Terhadap Motivasi masyarakat pondok kubang membayar Pajak bumi dan bangunan

Menurut Mangkoesobroto (1999) Sistem Perpajakan yang Berlaku berpengaruh terhadap motivasi masyarakat

membayar Pajak Bumi dan bangunan, karena sistem pajak yang memiliki administrasi yang memudahkan masyarakat, membuat motivasi masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajaknya menjadi lebih besar. Ini didukung dengan hasil penelitian yang membahas Nugraha (2002) dan Seftiawan (2009) memasukkan variabel ini didalam daftar pertanyaan pada quisioner mereka, sehingga dalam penelitian ini diambil hipotesis ketiga:

H3: Sistem Perpajakan yang Berlaku berpengaruh Terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif (descriptive research) untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yang akan memotivasi masyarakat agar berpartisipasi untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan tanpa adanya rasa keterpaksaan yang berlokasi di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut Nazir (2007) metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, satu objek, satu kondisi dengan satu sistem pemikiran pada manusia sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki.

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Penelitian

Agar konsep-konsep dapat diteliti, maka harus dioperasionalkan dengan cara merubahnya menjadi variabel yang berarti sesuatu yang memiliki variasi nilai (Sekaran, 2006). Variabel pada penelitian ini menurut pendapat Mangkoesobroto (1999) mengenai motivasi membayar pajak, dan dibagi menjadi dua variabel utama yaitu:

a. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik mempengaruhi secara positif dan negatif.

Pada penelitian ini variabel ini terdiri dari: Tingkat pendidikan, Pengetahuan wajib pajak, dan Sistem perpajakan.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi variabel independen baik secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini variabel ini adalah Motivasi.

3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut :

- a. Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang dimiliki Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang Seperti SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 yang merupakan suatu proses berkelanjutan yang diperoleh secara bertahap dan terpadu melalui jalur formal tertinggi sampai akhir dengan mendapatkan tanda lulus (ijazah). Variabel ini diukur dengan menilai jawaban responden pada kuisioner pada bagian Data Responden. Penilaian menggunakan skala ordinal, dimana data hasil pengamatan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, dan diantara kategori ada suatu urutan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan.
- b. Pengetahuan wajib pajak adalah seberapa besar pengetahuan wajib pajak mengenai PBB terutama mengenai pentingnya PBB bagi Negara dan masyarakat, jenis-jenis PBB yang berlaku, cara

penghitungan tarif PBB, cara mengisi formulir PBB, dan cara membayar PBB. Variabel ini diukur dengan menilai jawaban responden pada kuisioner bagian Pengetahuan Wajib Pajak yang diambil dari penelitian Ghoni (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah”. Disini kuisioner menggunakan skala Gutman, dimana responden diberikan pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban, ya dan tidak. Responden akan dilihat jumlah jawaban yang benar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika jawaban benar sebesar 5-6 maka responden tersebut dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Jika jawaban benar sebesar 3-4 maka responden tersebut dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan sedang. Jika jawaban benar sebesar 0-2 maka responden tersebut dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan yang rendah.

- c. Sistem perpajakan adalah kumpulan elemen yang menunjang tujuan utama dari perpajakan mulai dari penagihan sampai penggunaan pajak. Elemen-elemen tersebut antara lain: peraturan PBB yang berlaku, cara sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, cara membayar dan melaporkan pajak, bagaimana uang pajak disimpan dan bagaimana uang pajak digunakan. Variabel ini diukur dengan menilai jawaban responden pada kuisioner bagian Sistem Perpajakan, yang diambil dari penelitian Seftiawan (2009). Kuisioner dibuat dengan skala likert 5 jenis

jawaban dalam 11 pertanyaan. Untuk jawaban pertanyaan no 1-3 jika responden menjawab sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai 1, tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, sesuai (S) diberi nilai 4, sangat sesuai (SS) diberi nilai 5, Untuk jawaban pertanyaan no 4 jika responden menjawab sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5, Untuk jawaban pertanyaan no 5 jika responden menjawab sangat memberatkan (STS) diberi nilai 1, memberatkan (TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, tidak memberatkan (S) diberi nilai 4, sangat tidak memberatkan (SS) diberi nilai 5, Untuk jawaban pertanyaan no 6-11 jika responden menjawab sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5.

- d. Motivasi adalah sebuah dorongan yang dapat mengarahkan perilaku. Besarnya motivasi juga berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, apatis) dan juga kesesuaian terhadap perilaku. Dalam penelitian ini variabel utamanya adalah motivasi masyarakat dalam membayar PBB. Variabel motivasi diukur dengan menilai jawaban responden pada kuisioner bagian Motivasi Wajib Pajak yang diambil dari penelitian Ghoni (2012). Disini kuisioner menggunakan skala likert 5 jenis jawaban dalam 6 pertanyaan. Untuk setiap Jawaban jika responden menjawab

sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, netral (N) diberi nilai 3, setuju (S) diberi nilai 4, sangat setuju (SS) diberi nilai 5.

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indrianto dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki tanah dan atau bangunan (rumah) yang berada di kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdiri dari 10 Desa yaitu Desa Pondok Kubang, Desa Baturaja, Desa Tanjung Dalam, Desa Talang Tengah, Desa Paku Haji, Desa Linggar Galing, Desa Anyar, Desa Tanjung Terdana, Desa Dusun Baru Satu, Desa Harapan Makmur.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi dan jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasinya (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 2001). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

Teknik penentuan jumlah sampel yang akan diambil menggunakan rumus Taro Yamane (Arikunto, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d^2 = Presisi Yang ditetapkan

Berdasarkan data yang di peroleh dari daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP PBB 2013) Bengkulu Tengah, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan berjumlah ada 3976 wajib pajak. Sehingga jika dihitung dengan rumus Taro Yamane, jika presisi yang diinginkan sebesar 10% (tingkat keyakinan 90%) maka hasilnya:

$$\begin{aligned}n &= \frac{3976}{3976 (0,1)^2 + 1} \\ &= \frac{3976}{40,76} \\ &= 97,54\end{aligned}$$

Berarti jumlah sampel yang harus diteliti sebesar 98 sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka tehnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah Penelitian Survey. Yaitu Dengan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan berupa penelitian ke Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan dengan menggunakan Kuesioner (*questionnaire*). Kuesioner (*questionnaire*) merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

3.5 Metode Analisa Data

Tehnik analisis deskriptif digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan pemaparan unsur-unsur yang menjadi fokus penelitian. Sudjanah dan Ibrahim (2007:64) mengemukakan bahwa metode deskriptif untuk mendeskriptifkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian pada saat kejadian pada saat penelitian berlangsung. Dengan kata lain, metode deskriptif digunakan untuk menguraikan kemudian mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti dengan hal-hal yang menjadi pusat perhatian.

Metode analisis deskriptif sesuai dengan hakikatnya adalah data yang telah terkumpul itu kemudian diseleksi, dikelompokkan, dilakukan pengkajian, interpretasi dan disimpulkan, selanjutnya hasil dideskriptifkan. Pendeskriptifan data-data dilakukan dengan mengetengahkan fakta berhubungan dengan faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan kas Negara.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Ghozali, 2011). Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan.

Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran

pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.5.2 Uji Kualitas data

3.5.2.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Ghozali, 2011). Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali, untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukuran gejala yang sama.

Uji reliabilitas dengan dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.07 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011).

3.5.2.2 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Ghozali, 2011). Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang

memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total tiap konstruksinya signifikan pada lebih dari 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

3.5.3 Uji Asumsi Data

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Uji normalitas lain pada penelitian ini dengan menggunakan uji statistik non parametik Kolgorov Smirnoc (K-

S). uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: Jika nilai *Asymp.sig (2-tailed)* $> 0,05$ maka data terdistribusi normal

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas (Ghozali, 2011).

Untuk menilai adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF > 10 berarti terjadi Multikolinearitas.

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan uji glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

dasar pengambilam keputusannya jika nilai Sig variabel dibawah 0,05 maka terjadi heterodiktas dan jika nilai Sig variabel diatas 0,05 maka tidak terjadi heteodiktas.

3.5.4 Analisis Regresi

Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah bebas (X) dengan satu peubah tak bebas (Y) (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini hubungan yang diteliti adalah hubungan antara Tingkat pendidikan (X_1), tingkat pengetahuan (X_2), Sistem perpajakan (X_3) dan motivasi membayar PBB (Y). Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan:

Y : Motivasi membayar PBB

x_1 : Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PBB

x_2 : Tingkat wajib pajak PBB

x_3 : Sistem Perpajakan yang Berlaku

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

e : Error

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (Ghozali, 2011).

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Signifikansi (Sig) F yang dibandingkan dengan yang ditetapkan yaitu 0,05. Jika nilai Sig F < 0,05 maka secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.5.2 Uji R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Dalam kenyataan nilai *adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2011) jika dalam uji empiris di dapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *Adjusted* $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1-k)/(n-k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.

3.5.3.3 Uji t

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Maka uji t dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$T = \frac{B_1}{s B_1}$$

Keterangan:

T : Observasi

B_1 : Koefisien regresi variabel

sB_1 : Standar error B_1

Dimana :

Ho : secara parsial tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y

Ha : secara parsial ada pengaruh variabel X terhadap Y

Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak atau dengan kata lain hipotesis alternatif yaitu secara parsial variabel X mempengaruhi variabel Y (Ghozali, 2005).